



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GERINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMBALI
2. Jabatan : WAKIL KETUA FRAKSI
3. NHK : 943567

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 30.000 m2/160 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 266.000.000

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MX Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 123.050.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.321.540

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.433.371.540

III. HUTANG Rp. 40.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.393.371.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.